

MTQ Kabupaten Serang Digelar Akhir Agustus

SERANG (IM)- Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Serang akan dilaksanakan pada akhir Agustus ini. Pada masa pandemi Covid-19 ini, kata Nanang, pelaksanaan MTQ kali ini akan berbeda dari yang biasa dilaksanakan. Pelaksanaan MTQ nanti akan digelar secara terbatas agar tidak menimbulkan kerumunan. Seperti kegiatan pawai dihilangkan, kemudian kegiatan seremonial lainnya seperti pembukaan juga akan dilaksanakan secara terbatas.

"Namun untuk perlombaan tetap dilaksanakan seperti biasa yaitu di masjid-masjid sesuai mata cabang dan dengan protokol kesehatan (prokes), warga juga tidak boleh ada yang menonton," kata Nanang, Jumat (6/8). Namun demikian, kata Nanang, terkait kepastian tanggal serta teknis pelaksanaan akan dirapatkan pada Senin

(9/8) mendatang. Rapat akan digelar bersama para camat se-Kabupaten Serang.

"MTQ rencananya akan kita laksanakan di akhir Agustus, tapi untuk tanggalnya dan tempatnya nanti Senin dirapatkan, termasuk teknisnya kita bicarakan Senin," tuturnya.

Nanang juga mengungkapkan, bahwa sebelum MTQ digelar para peserta dan panitia nantinya akan disarankan untuk divaksin bagi yang belum. Menurutnya, hal ini juga bertujuan untuk sosialisasi vaksin. "Kalau yang sudah alhamdulillah yah, kalau yang belum segera divaksin," katanya.

Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan untuk gelaran MTQ ini, Nanang mengaku tidak begitu mengetahuinya. Menurutnya yang mengetahui adalah bagian Kesra Setda Kabupaten Serang.

"Itu yang tahu Kabag Kesra, karena belum rapat. Tapi masing-masing camat kemarin sudah dibuat anggaran yang akan disetujui," imbuhnya. ● **pra**

BERSAMA PAGUYUBAN WARGA PAKUALAM

DPU Tangsel Cari Solusi

Penanganan Banjir di Serpong Utara

TANGSEL (IM)- Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berjanji akan menyelesaikan permasalahan banjir di tiga perumahan wilayah Serpong Utara. Tiga perumahan itu yakni, perumahan Griya Sutera, Griya Hijau dan Pondok Pakulonan. Hal itu dikatakan Kepala DPU Tangsel, Aries Kurniawan.

Dalam diskusi dengan Paguyuban Warga Pakualam dan Estate Management Alam Sutera, pada Jumat (6/8), Aries menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Tangerang Selatan. "Balai Besar Wilayah Sungai serta pihak pengembang juga kita koordinasikan untuk mencari titik temu permasalahan banjir yang terjadi di tiga perumahan di Serpong Utara," ujar Aries.

Aries melanjutkan, DPU Tangsel bersama Alam Sutera tengah melakukan rekayasa saluran air sebagai jalan keluar dari permasalahan banjir. DPU Tangsel juga bekerja sama dengan Puskidklantas Polri. "DPU Tangsel serta pengembang Alam Sutera juga sedang melakukan rekayasa saluran air bekerjasama dengan Puskidklantas Polri hingga saluran air Duta Bintaro tersebut dibuka," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak Alam Sutera sudah berperan aktif dalam membantu warga Pakualam dan Pakulonan disaat situasi banjir. Kuasa Hukum paguyuban warga Pakualam, Garry Tapilatu, berjanji untuk terus mengawal dan mengutus permasalahan pada setiap pihak serta instansi terkait dan bertanggung jawab dalam mengatasi banjir.

"Kami berjanji untuk mengawal dan mengutus permasalahan ini hingga permasalahan banjir di Griya Sutera, Griya Hijau dan Pondok Pakulonan dituntaskan," tandasnya. ● **pp**

IDN/ANTARA



VAKSINASI WBP DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima suntikkan vaksin COVID-19 Sinovac di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang Kota Tangerang, Banten, Jumat (6/8). Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang bekerja sama dengan Kodim 0506/Tgr menyelenggarakan vaksinasi untuk 430 warga binaan sebagai upaya pengendalian COVID-19.

Pemkot Tangerang Beri Keringanan Denda PBB bagi Wajib Pajak

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini kembali memberikan keringanan penghapusan sanksi denda administrasi pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk seluruh masa pajak atau tahun. Kepala Bidang Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB Pada Bapenda Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman di Tangerang, kemarin mengatakan bahwa program penghapusan denda pajak tersebut merupakan rangkaian untuk memeriahkan semarak gebyar Agustus 2021 serta meringankan beban bagi masyarakat wajib pajak di tengah pandemi Covid-19.

"Program ini program lanjutan di bulan sebelumnya yaitu Juli Peduli. Kemudian saat ini ada program penghapusan denda pajak yang berlaku selama bulan Agustus 2021 dan berlaku untuk buku golongan 1 hingga golongan 5, yang dihapuskan adalah denda 2 persen perbulan yang berlaku secara akumulatif," katanya.

Dwi menjelaskan pada penghapusan denda pajak PBB tersebut dapat diketahui dengan mengakses melalui aplikasi digital yang bisa di cek di android yakni iPBB Kabupaten Tangerang. "Penghapusan sanksi denda ad-

ministrasi PBBP2 berlaku secara otomatis melalui sistem. Para wajib pajak atau masyarakat dapat mengecek dalam iPBB Kab. Tangerang yang dapat diunggah melalui playstore, nantinya pada aplikasi tersebut akan muncul tagihan pokok saja tanpa denda," jelasnya.

Kemudian, ia menyebutkan jika pokok PBB cenderung sangat terjangkau bagi masyarakat, karena hanya mencapai 0,15 persen sampai 0,225 persen, sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Selain itu, pihaknya juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar PBB pokok melalui Bank BJB dengan berbagai tenant, baik melalui M-Banking, Intenec Banking, Sms Banking. "Pembayaran itu bisa juga melalui Alfamart, Indomaret ataupun E-Commer seperti Tokopedia, Bukalapak, Gopay, LinkAja dan juga melalui Kantor Pos diseluruh Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga dapat dilakukan secara online atau melalui akun masing-masing di PPAT atau PPATS. "Bagi masyarakat yang ingin mengajukan validasi BPHTB, untuk saat ini dapat mencetak sendiri bukti validasi BPHTB melalui akun masing-masing secara digital," tambahnya. ● **pp**



IDN/ANTARA

JALAN ANTARDESA TERTIMBUN LONGSOR DI LEBAK

Warga menggunakan roda dua melintas di jalan yang longsor di Desa Banjarsari, Lebak, Banten, Jumat (6/8). Hujan deras yang mengguyur daerah tersebut mengakibatkan jalan antardesa tertimbun longsor pada Rabu (5/8) malam, dikhawatirkan terjadi longsor kembali jika hujan karena tanah yang masih labil.

Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau, DPRD akan Panggil Bulog

Bulog wilayah Lebak-Pandeglang seperti ini tidak punya standar kerja yang jelas. Adapun mereka siap mengganti, itu lain soal, tidak semudah itu. Bulog seperti tidak mau belajar dari pengalaman, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, Acep Dimiyati.

LEBAK (IM)- Beras bantuan dalam kondisi bau busuk dan menggumpal tidak hanya diterima warga terdampak Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pandeglang. Warga Desa Parahieng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, juga menerima bantuan tak layak konsumsi itu. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, Acep Dimiyati mengatakan sudah mendapatkan laporan mengenai adanya beras bantuan yang berbau dan menggumpal di sejumlah lokasi di Lebak. Karena itu, dia mengaku kecewa dengan

kinerja Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang yang telah mendistribusikan bantuan itu. "Yang jelas saya sangat menyangkan terkait kondisi beras bantuan yang sangat tidak layak konsumsi itu," kata Acep, Jumat (6/8).

Menurut politisi PKB ini, Bulog tidak mempunyai standar kerja yang jelas. Mereka juga dinilai tidak belajar dari pengalaman yang pernah ada. "Bulog wilayah Lebak-Pandeglang seperti ini tidak punya standar kerja yang jelas. Adapun mereka siap mengganti, itu lain soal, tidak semudah itu. Bulog seperti tidak mau belajar dari pengalaman," katanya.

Acep menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Bulog. "Hal ini akan saya sampaikan kepada Komisi III, dan Insya Allah dalam jangka waktu dekat kita akan panggil pihak Bulog," katanya.

Sebelumnya diberitakan, warga Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terdampak PPKM menerima beras bantuan tidak layak konsumsi. Beras yang didapat warna berwarna kuning dan kotor.

Beras bantuan tersebut dari Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Kabupaten Pandeglang, Uki, salah seorang warga Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, yang menerima beras bantuan tersebut kecewa dengan kualitas dari beras bantuan PPKM tersebut.

"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutuan juga pak. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk," kata Uki kepada wartawan, Kamis (5/8).

Hal serupa diungkapkan Dedi, warga Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Dia mengatakan beras bantuan dari pemerintah tidak layak untuk dikonsumsi. "Atuh ini mah bukan untuk manusia kang, lihat saja berasnya seperti apa. Masa kita dikasih beras kaya gini, kan enggak manusiawi. Binatang juga kalau kata kasarnya mah, pasti menolak untuk memakannya," ungkap Dedi.

Tak Layak dan Bau Busuk

Sementara itu di Lebak, kondisi beras bantuan untuk warga Lebak terdampak kebijakan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga ditemukan tidak layak. Beras itu dalam kondisi bau busuk.

Camat Leuwidamar, Haji Arsid, membenarkan beras untuk warga terdampak PPKM itu tak layak dimakan. "Informasi di Desa Lebak Parahieng, informasinya tidak layak makan, itu cuma dua karung sih. Tapi sudah diganti," ujarnya saat dihubungi, Jumat (6/8).

Arsid mengungkapkan, laporan soal beras bantuan tidak layak konsumsi ini baru terjadi di Desa Parahieng. "Sementara ini belum ada informasi yang lain. Layak berarti yang lain," katanya.

Arsid mengatakan, beruntung beras tidak layak tersebut belum didistribusikan ke masyarakat terdampak PPKM. Sebab kondisi beras tidak layak tersebut ditemukan kepala desa setempat. "Oleh kepala desa (menemukan beras tidak layak), itu baru di kantor desa," katanya.

Arsid menjelaskan pihaknya tidak terlibat dalam pendistribusian beras bantuan tersebut. Beras langsung didistribusikan ke desa-desa oleh Bulog divre Lebak - Pandeglang, dengan pengawasan pihak kepolisian.

"Memang belum semua dikirim, baru Lebak Parahieng dan Cibungur. Itu kan kami Kecamatan tidak ada informasi sebelumnya, kami baru tau setelah ada masalah. Pengawalannya dari kepolisian (kecamatan tidak dilibatkan), Iya (langsung ke desa)," ungkapnya. ● **pra**

TERKAIT DUGAAN PUNGLI

Badan Kepegawaian Panggil Lurah Paninggilan Tangerang

TANGERANG (IM)-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang akan memanggil Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungutan liar (pungli). "Memang hari ini kita sudah dapat bahan awal dan kita akan baru melakukan pemanggilan," ujar Ciprianus Suhud Muji, Kabid Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang, Jumat (6/8).

Menurutnya, lurah tersebut mengidap penyakit sehingga pemanggilan tidak bisa dilakukan secara mendadak. "Iya betul memang yang bersangkutan agak stroke. Jadi memang untuk pemeriksaan orang sakit itu kan enggak bisa mendadak," jelasnya.

Bahkan sebelum mencuatnya perkara ini pihak BKPSDM Kota Tangerang pernah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. "Dulunya juga sudah kita panggil tapi memang kondisi juga sakit. Jadi baru kita akan panggil terkait kasus 250 ini. Nah itu yang harus kita lihat apakah memang benar atau apa," tambahnya.

Cipi menambahkan pihaknya tidak ingin langsung mengambil

kesimpulan dalam persoalan ini. Terlebih, BKPSDM belum meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. "Ya tentu beda dengan pada saat mengucapkan atau apa. Atau mungkin dilakukan dengan sadar atau apa. Tentu berbeda. Karena kita juga melihat kondisi fisiknya sakit mungkin dia ceplos ceplos aja," pengkasnya.

Dimintai Penjelasan

Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang akan dimintai keterangan soal dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp250 ribu kepada warganya. Hal itu disampaikan Camat Ciledug, Syarifudin.

Ia mengatakan pihaknya baru akan memanggil yang bersangkutan buntut sebuah video viral yang memperlihatkan bawahannya yang memeras warga untuk jasa tanda tangan. "Sementara kita baru panggil. Ini kan indikasi. Makanya kita, udah panggil, kita minta penjelasan ke beliau," kata Syarifudin saat dihubungi, Jumat (6/8).

Syarifudin enggan memberi keterangan lebih lanjut terkait penyelidikan dan pemerkasaan yang dilakukannya. Termasuk sanksi

yang dikenakan kepada Lurah atau pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Syarifudin, kasus tersebut saat ini juga baru akan diselidiki oleh tim dari inspektoral sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan. "Sampai saat ini belum. Masih dalam proses. Apa dan bagaimana nanti, setelah hasil verifikasi dari temen-temen inspektoral," kata dia.

Dugaan pungli oleh Lurah Paninggilan Utara tersebar lewat video yang diunggah akun Instagram @info_ciledug. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik itu, seorang warga mendatangi Lurah dan mengklarifikasi dugaan permintaan uang kepada keponakannya yang membutuhkan tanda tangan untuk dokumen ahli waris. "Ada fee-nya ya, Pak?" tanya perekam video.

"Ada itu mah," jawab seorang pria berseragam ASN.

"Tadi saya denger katanya, Rp250 ribu?" sambung sang pria.

"Iya," sahut sang pria tersebut.

"Buat apa maksudnya? Setahu saya ini gratis Pak di semua Kelurahan. Bapak kan ibaratnya aparat. Ini lagi kesudahan ini Pak. Masih pada kecil-kecil, masih butuh biaya," ujar sang warga. ● **pp**

Pengusaha Hiburan Tangsel Menjerit karena PPKM Level 4

TANGSEL (IM)- Asosiasi Pengusaha Hiburan (Asphira) di Tangerang Selatan mengaku sudah tidak mampu menjalankan operasional usaha di masa PPKM Level 4 saat ini. Mereka meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), memberikan kelonggaran -kelonggaran terhadap aktifitas masyarakat. Demikian itu dikatakan Ketua Asphira, Yono Haryono saat dikonfirmasi, Jumat (6/8). "Saat ini karena kita sudah tutup total tidak ada omzet. Sudah sekarat di PPKM Level 4 ini, sudah stadium akhir," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Yono menyatakan, banyak pekerjanya kembali ke kampung halaman. Mereka beralih profesi ke sektor lain. (Tapi) Mereka kan mau hidup, kalau itu sampai terjadi ini dosa kita semua. Karena mungkin ingin bertahan hidup, survive," ungkap Yono.

Untuk itu, Yono meminta Pemerintah dan DPRD Tangsel, agar menurunkan level PPKM

di wilayah Tangsel. Agar adanya kelonggaran -kelonggaran yang bisa memacu pemulihan ekonomi untuk sektor usaha pariwisata.

"Sudah 80 persen pelaku usaha hiburan yang divaksin, mulai dari bartender, JC dan lainnya tinggal vaksin kedua dalam beberapa waktu hari ini. Maka itu bagaimana kita berubah level dengan indikator yang ada, sehingga kita bisa normal beraktivitas lagi," jelasnya.

Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel, Gusri Effendi menegaskan, para pelaku usaha penyedia jasa makanan di Tangsel juga sudah menjerit. Sebab, biaya operasional yang tidak sebanding dengan rata-rata penjualan harian mereka. "Rata-rata tamu di hotel antara 15-20 persen. Padahal listrik dan pegawai tetap costnya. Kalau ini terus diperpanjang, daya tahan kita sudah enggak punya. Semakin pingsan," sebutnya.

"Orang datang ke restoran kan utamanya pengen nongkrong. Ada yang diobrolin. Kalau dine-in mending cari warteg lebih murah. Cost karyawan 20 persen, penerimaan 10 persen, hitung sendiri lah, pingsan kita," sambungnya. ● **pp**

Kuota Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi di Tangerang Ditambah

TANGERANG (IM)- Kementerian Sosial menambah kuota 3.548 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tangerang, pada dua program bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Total penambahan di Kota Tangerang sebanyak 3.548 KPM. Sebanyak 1.605 KPM bertambah untuk program PKH dan tambahan 1.943 KPM untuk program BPNT," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah di Kantor Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Jumat (6/8).

Di tempat itu, Arief juga menyerahkan kartu ATM dan buku rekening bank bagi 446 KPM baru di Kecamatan Larangan. Dia berpesan kepada masyarakat yang hadir

untuk dapat menggunakan dana bantuan sosial pandemi Covid-19 yang diterima secara bijak dan untuk keperluan yang bermanfaat. "Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi akan sangat bermanfaat di situasi pandemi seperti sekarang ini," ucap Arief.

Karena jumlah yang tidak besar, Arief mengingatkan agar kartu serta buku rekening yang diterima tidak diserahkan ke orang lain untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. "Saya tegaskan kartunya harus disimpan sendiri, jangan dipegang orang lain. Dan kalau ada yang motong dana bantunya, jangan takut untuk laporkan ke Pemkot. Akan kami proses kalau ada laporan pungli bansos milik bapak ibu," ungkap dia. ● **gul**



IDN/ANTARA

PEDAGANG PASAR WAJIB TUNJUKKAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19

Seorang pedagang menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 miliknya di pasar tradisional Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (6/8). Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan syarat wajib kepada para pedagang di pasar tradisional untuk memiliki sertifikat vaksin COVID-19 bagi yang mau berjualan.